

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KELURAHAN MALLILINGI
KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG
(Studi Komunikasi Pembangunan)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi (S.Ikom) Jurusan Ilmu Komunikasi
pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

A. M. DIRGA FIRGIAWAN

NIM: 50700113199

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. M. Dirga Firgiawan
NIM : 50700113199
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 11 Juni 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Komunikasi
Fakultas/Program : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Jl. Daeng Tata 1 Blok 3 Timur No.2
Judul : Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi
Pembangunan).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Maret 2018

Penyusun,

A. M. Dirga Firgiawan
NIM: 50700113199

PERSETUJUAN PEMBIMBING

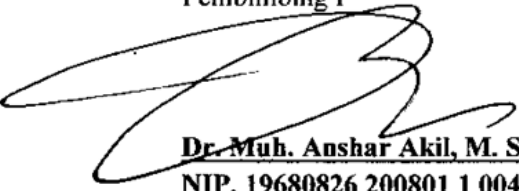
Pembimbing penulisan skripsi saudara A. M. Dirga Firgiawan, NIM: 50700113199 mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi Pembangunan)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui ke ujian Munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan dan diproses lebih lanjut.

Samata, Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muh. Anshar Akil, M. Si
NIP. 19680826 200801 1 004


Rahmawati Harana, SS., M. Si
NIP. 19780619 200912 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi Pembangunan)", yang disusun oleh A. M. Dirga Firgiawan, NIM: 50700113199, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 28 Maret 2018 M, bertepatan dengan 11 Rajab 1439 Hijriah, Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom), Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 28 Maret 2018 M.
11 Rajab 1439 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Haidir Fitra Siagian. S.Sos., M. Si., Ph. D	(.....)
Sekretaris	: Dra. Audah Mannan. M. Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Misbahuddin, M. Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Kamaluddin Tajibu, M. Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Anshar Akil, ST., M. Si	(.....)
Pembimbing II	: Rahmawati Haruna. SS., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar,

Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M

NIP. 19690827 199603 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan (moril maupun materil), motivasi, saran, dan petunjuk dari berbagai pihak. Secara khusus penulis

menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda A. Nur Alam Samad dan Ibunda A. Martini M S.Sos, atas segala pengorbanan, kasih sayang, begitupun dukungan moril dan materil yang tak pernah putus diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudara saya, A. Suci Aprilia Wulandari, A. M. Dandi Bangsawan, A. M. Riffat Ruhud Jihad atas bentuk perhatian, dan semangatnya.

Oleh karena itu, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M.Pd, M.Si, M.M, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta seluruh dosen dan staf akademik yang telah membantu penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Ibu Ramsiah Tasruddin, S.Ag., M.Si, dan Bapak Haidir Fitrah Siagian, M.Si., Ph.D, selaku Ketua, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang membantu dalam segala hal, mulai dari pemilihan judul hingga penyelesaian penulis dan juga masukan-masukan yang memberikan semangat bagi penulis
4. Bapak Muhammad Rusli, S.Ag., M.Fil.I selaku Staf Jurusan Ilmu Komunikasi, membantu penulis dalam hal pembuatan berkas dan persuratan-persuratan dan memberikan motivasi yang baik.

5. Bapak Dr. Muh. Anshar Akil, M. Si dan Ibu Rahmawati Haruna, SS., M. Si. Pembimbing I dan pembimbing II yang telah membantu mengoreksi, memberikan saran, memberikan referensi, dan sekaligus menjadi motivator bagi penulis demi melancarkan penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. H. Misbahuddin, M.Ag dan Bapak Dr. H. Kamaluddin Tajibu, M.Si, sebagai Munaqisy I dan Munaqisy II yang telah membantu dalam mengoreksi, memberikan kritikan membangun terhadap penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen, Bagian Tata Usaha dan Akademik, serta Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, arahan, motivasi, dan nasihat selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Komunikasi.
8. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2013 yang penuh rasa solidaritas memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Serta semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya, hanya kepada Allah Swt penulis berharap semoga bantuan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin

Makassar, 22 Maret 2018

Penulis,

A. M. Dirga Firgiawan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Konsep Komunikasi	12
B. Komunikasi Pembangunan.....	27
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	37
D. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)	48
E. Musyawarah Dalam Pandangan Islam	55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Sumber Data.....	58
D. Metode Pengumpulan Data.....	58
E. Instrumen Penelitian.....	59
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
B. Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng	63
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten bantaeng	69
D. Pembahasan.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Implikasi Penelitian.....	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	A K A S S A R
--------------------------------	----------------------

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan h}a

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h} a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	d} al	d	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fath}ah dan ya</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fath}ah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
اُوْ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

4. Ta>' marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>-*

t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-h}ikmah*



ABSTRAK

Nama : A. M. Dirga Firgiawan
NIM : 50700113199
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi
Pembangunan)

Penelitian ini bertujuan mengetahui wujud partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat terwujudnya komunikasi partisipatif masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan keilmuan yaitu Ilmu komunikasi dengan penekanan pada komunikasi antarpribadi dan komunikasi verbal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng terwujud dalam hal menghadiri, menyampaikan usulan mereka, dan melaksanakan kegiatan bersih-bersih (2) Faktor Pendukung dalam Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu tokoh masyarakat yang selalu mengingatkan dan menggugah kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Adapun faktor penghambatnya adalah berkurangnya kesadaran mereka karena kesibukan pribadi yang tidak ingin ditinggalkan dan anggapan bahwa pembangunan adalah urusan pemerintah serta ketidakpuasan masyarakat dalam Realisasi Program.

Adapun implikasi penelitian adalah diharapkan bahwa dengan pelaksanaan Musrenbang selanjutnya akan tercipta Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi khususnya dalam mengemukakan usulan dan berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan Musrenbang secara hakiki dapat tercapai.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat di daerah yang terdiri atas berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah dengan berbagai departemen dan non department di daerah sesuai dengan tugas pokok serta tanggung jawab masing-masing. Dalam realisasi fisiknya pembangunan daerah justru bersifat menyeluruh, tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat serta dengan menggali segala potensi dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang berusaha memadukan arah pembangunan sektoral dan regional dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dari pusat sampai ke daerah dan desa, sehingga dari sinilah perlu disadari bahwa beban dan tanggung jawab pembangunan bukanlah tugas yang ringan justru berhasil dan tidaknya pembangunan akan berakibat langsung terhadap kehidupan dan penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia.

Kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan kreasi yang lahir dari dasar kesadaran dan tanggung jawab masyarakat mutlak perlu sesuai dengan hakekat pembangunan yang pada prinsipnya dilakukan oleh

masyarakat sendiri dan mendapat pengarahan, bimbingan, dan bantuan serta pengawasan dari pemerintah.

Dasar-dasar pelaksanaan Musrenbang ini dilaksanakan atas dasar surat edaran bupati yang dalam pelaksanaannya menurut amanat Undang-Undang Nomor 25. Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Desa dan Kelurahan diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah di Desa/Kelurahan.

Pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat di daerah yang terdiri atas berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah dengan berbagai departemen dan non departemen di daerah sesuai dengan batas pokok serta tanggung jawab masing-masing. Dalam realisasi fisiknya pembangunan daerah justru bersifat menyeluruh, tersebar luas ke seluruh pelosok desa serta dengan menggali segala potensi dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang berusaha memadukan arah pembangunan sektoral dan regional dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Meskipun peluang dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, cukup terbuka luas, namun sebagian masyarakat kurang memahami mekanisme untuk berpartisipasi langsung dalam perumusan dan penyusunan perencanaan. Bahkan sering terjadi perubahan-perubahan kelembagaan partisipatif masyarakat di desa/kelurahan, seperti dari LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) ke LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) tidak

dilakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memahami kondisi perubahan tersebut, disamping itu tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat dalam mekanisme perencanaan pembangunan juga masih sangat kurang.

Fenomena yang lain juga biasa terjadi dalam Musrenbang ini yaitu masyarakat masih belum puas dan percaya akan pelaksanaan Musrenbang. Mereka menganggap bahwa Musrenbang hanya janji belaka. Itu terjadi disebabkan karena salah satu usulan yang diajukan dalam pelaksanaan Musrenbang belum terwujud. Hal ini juga terjadi pada masyarakat di Kabupaten Bantaeng, sehingga mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh bagaimana wujud komunikasi partisipasi masyarakat pada Musrenbang di Kabupaten Bantaeng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini membahas partisipatif masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Bantaeng.

Dari latar belakang masalah mengenai komunikasi partisipatif masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Bantaeng, maka peneliti mengidentifikasi beberapa pokok dan istilah yang terdapat pada kata kunci, yakni sebagai berikut:

1. Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan yang disampaikan tadi.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam bentuk ide, gagasan, kritikan ataupun pendapat lainnya yang diberikan pada Musrenbang.

3. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun dari luar. Dalam hal ini Musrenbang oleh pemerintah Bantaeng.

D. Kajian Pustaka

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menemukan penelitian yang relevan dengan apa yang menjadi fokus penelitian, beberapa penelitian tersebut yaitu:

1. Mochammad Rindho Nugroho, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman penelitian ini menyampaikan bagaimana alur proses MUSRENBANG di Desa Catur Tunggal dan bagaimana proses MUSRENBANG ,dan pengaruh dari partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan desa.
2. Andi Ripai, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bonto Matene Kabupaten Kepulauan Selayar, Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Nasruddin, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul skripsi Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang, penelitian ini membahas tentang di fokuskan kepada Analisis Implementasi Kebijakan Terhadap Komunikasi dan Sumber Daya Manusia dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa dan Respons Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan di Desa Pattallassang.

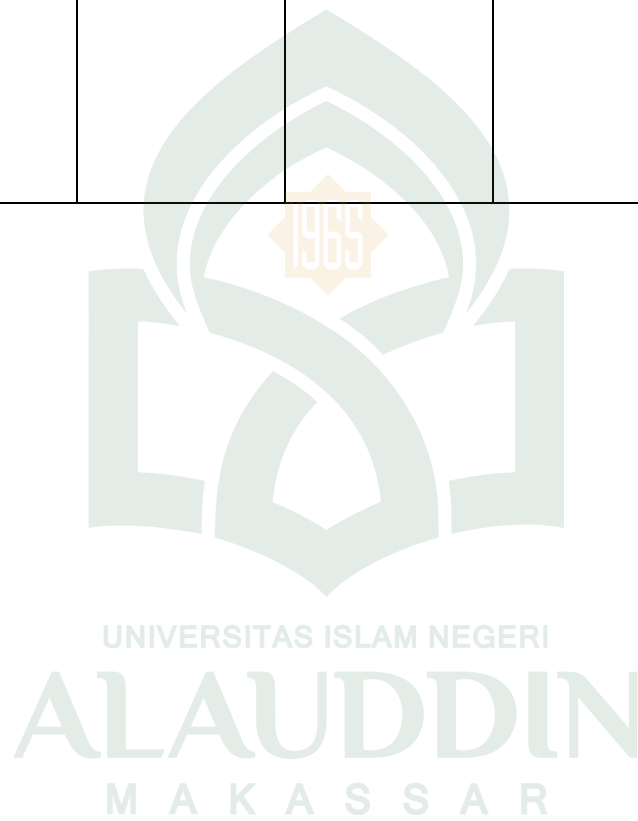
No.	Judul/Penulis	Fokus	Teori	Metode	Hasil
1.	Mochammad Rindho Nugroho, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.	Penelitian ini menyampaikan bagaimana alur proses Musrenbang di Desa Catur Tunggal dan di analisis melalui dua pendekatan yaitu Teori medan dan Teori Tindakan Komunikatif.	Teori Tindakan Komunikatif, Habermas memiliki pandangan atau fokus pembahasan yang berbeda mengenai musyawarah dibanding Boudieu. Musyawarah, menurut Habermas meyakini bahwa tindakan antarmanusia atau interaksi sosial didalam sebuah masyarakat tidak terjadi secara semena-mena, melainkan pada dasarnya bersifat rasional.	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali lebih jauh persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan Musrenbang di Desa Catur Tunggal.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Musrenbang di Desa Catur Tunggal tidak hanya menjadi ruang publik bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan membuat konsensus.
2.	Andi Ripai, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui	Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan Merupakan	Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe	hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa

	dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bonto Matene Kabupaten Kepulauan Selayar	tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.	aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.	penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kec Bontomatene Kab Kepulauan Selayar.	partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene masih tergolong sedang.
3.	Nasruddin, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul skripsi Respon Masyarakat	kebijakan publik dalam tahapan pada Implementasi kebijakan yaitu Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang sangat penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa	Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke

	Terhadap Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang	Gowa ke Kecamatan Pattallassang terkhusus penelitian di Desa Pattallassang	masyarakatlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dan masyarakat jugalah permasalahan yang mereka hadapi. Namun kenyataan yang masih terlihat bahwa di setiap program pembangunan, partisipasi masyarakat belum terlihat secara keseluruhan.	menggambarkan pokok masalah penelitian implementasi kebijakan dan Respon masyarakat di Kecamatan Pattallassang terkhusus di Desa Pattallassang.	Kecamatan Pattallassang Implementasi kebijakan masih belum optimal baik Komunikasi dan Sumber daya dan belum lagi Disposisi dan struktur birokrasi yang masih belum bisa di nilai jelas dalam pelaksanaan. Kemudian respon masyarakat dalam pemindahan pembangunan ini sangat rendah yang diakibatkan takutnya kebijakan tersebut berjalan tidak sebagaimana mestinya.
4.	A.M. Dirga Firgiawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Fokus penelitian ini membahas komunikasi partisipatif masyarakat pada musyawarah perencanaan	Komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-	Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena bertujuan mendeskripsikan dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan

		<p>pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Bantaeng.</p>	<p>keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan yang disampaikan tadi.</p>	<p>menguraikan bukti komunikasi partisipatif masyarakat pada MUSRENBANG di Kabupaten Bantaeng.</p>	<p>Bantaeng Kabupaten Bantaeng terwujud dalam hal menghadiri, menyampaikan usulan mereka, dan melaksanakan kegiatan bersih-bersih (2) Faktor Pendukung dalam Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu tokoh masyarakat yang selalu mengingatkan dan menggugah kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Adapun factor penghambatnya adalah berkurangnya kesadaran</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>mereka karena kesibukan pribadi yang tidak ingin ditinggalkan dan anggapan bahwa pembangunan adalah urusan pemerintah serta ketidakpuasan masyarakat dalam Realisasi Program.</p>
--	--	--	--	--	--



E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui wujud partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terwujudnya komunikasi partisipatif masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan aspek teoritis yang dapat menambah dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan dalam proses pembuatan kebijakan khususnya dalam Perencanaan Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Komunikasi

Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari kata latin yang berarti “sama”.¹ Istilah pertama (*communis*) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau pesan dianut secara sama. Akan tetapi definisi-definisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada cara berbagai hal-hal tersebut, seperti dalam, berbagai pikiran, mendiskusikan makna, dan mengirimkan pesan.²

Komunikasi adalah suatu interaksi penyampaian pesan antara satu dengan lainnya, baik itu secara individu maupun antara kelompok. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang yang baik umum digunakan dalam komunikasi antarmanusia atau bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, angka-angka atau tanda-tanda lainnya.

Kurangnya kesamaan pandangan mengenai sifat dasar dari ilmu komunikasi dalam hal ini direfleksikan terdapat dua mazhab utama di dalam ilmu komunikasi, yaitu :

¹William A. Gordon, *Communitas Personal and Public* (Sherman Oaks, CA. Alfred 1978). h.28.

²Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1997), h.4.

Kelompok yang melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Kelompok ini fokus dengan bagaimana pengirim dan penerima, mengirimkan dan menerima pesan. Kelompok ini juga sangat memerhatikan dengan hal-hal seperti efisiensi dan akurasi. Pandangan ini melihat komunikasi sebagai proses dimana seseorang mempengaruhi perilaku atau cara berpikir orang lain. Jika efek yang muncul berbeda atau kurang dari yang diinginkan mazhab ini cenderung untuk berbicara dengan istilah-istilah seputar kegagalan komunikasi untuk menentukan dimana kegagalan terjadi.

Melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Kelompok ini fokus dengan bagaimana pesan, atau teks, berinteraksi dengan manusia di dalam rangka untuk memproduksi makna, artinya pandangan ini sangat memerhatikan pesan teks didalam budaya. Kelompok ini menggunakan istilah seperti signifikasi (pemaknaan), dan tidak menganggap kesalahpahaman tersebut mungkin merupakan hasil dari perbedaan-perbedaan budaya antara pengirim dan penerima.

Adapun komponen-komponen atau unsur komunikasi yaitu³ :

a. Pengirim atau sumber

Pengirim adalah orang yang membuat pesan, yang ingin menyajikan pikiran dan pendapat tentang suatu peristiwa atau objek. Sebagai pengirim pesan yang bertujuan tertentu maka pengirim tidak selalu dalam posisi serba tahu atau serba kenal terhadap penerima. Karena itu. Pengirim mentransmisikan pesan untuk mendapat respon demi menyamakan persepsi terhadap pesan.

³ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011)

b. Penerima

Penerima (*receiver*) adalah komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Penerima juga dapat berarti orang yang menafsirkan pesan yang diucapkan atau yang ditulis. Sama seperti informasi mengenai objek atau peristiwa, maka penerima tentu pernah mempunyai pengalaman sekecil apapun terhadap pesan-pesan tertentu, yang sama atau berbeda dengan pengirim. Ketika suatu pesan diterima, maka orang yang menerima menginterpretasi pesan-pesan itu kemudian dapat dikirimkan kembali kepada pengirim.

c. Balikan (*feedback*)

Merupakan informasi bagi sumber sehingga ia dapat menilai efektifitas komunikasi untuk selanjutnya menyesuaikan diri dengan situasi yang ada.

d. *Encoding dan Decoding*

Encoding yaitu penyandian, yakni proses pengalihan pikiran kedalam bentuk lambang. *Encoding* juga berarti proses dimana pengirim menerjemahkan ide atau masukannya kedalam simbol-simbol berupa kata-kata atau nonverbal. Hasil terjemahan ide ini merupakan pesan yang akan dikirimkan kepada penerimanya. Sementara itu, aktifitas seorang penerima adalah *Decoding*, yaitu menerjemahkan simbol-simbol verbal dan nonverbal tadi kedalam pesan yang bisa saja mirip, persis sama dengan atau sangat berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh pengirim.

e. Pesan

Pesan adalah gagasan, perasaan atau pemikiran yang telah di-*encode* oleh pengirim atau di-*decode* oleh penerima. Pesan disampaikan dengan cara tatap muka atau media komunikasi. Pada umumnya pesan-pesan terbentuk berbentuk sinyal, simbol, tanda-tanda atau kombinasi dari semuanya dan berfungsi sebagai stimulus yang akan direspons oleh penerimanya. Apabila pesan ini berupa tanda, maka kita dapat membedakan tanda yang alami artinya tanda yang diberikan oleh lingkungan fisik, tanda mana sudah dikenal secara universal. Contoh, guntur dan awan hitam menandakan bahwa hujan akan turun. Kita menafsirkan pesan yang bertanda denotatif. Adapula tanda yang dibuat oleh manusia, tanda seperti ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan objek yang akan dijelaskan hingga sering disebut simbol. Jika tanggapan terhadap tanda harus kita berikan secara denotatif, maka simbol harus dimakan secara konotatif. Disebut konotatif karena pemaknaan terhadap tanda dikaitkan dengan konvensi manusia tentang simbol-simbol ini, karena itu sering simbol tersebut sebagai *the emotional association*.

Membicarakan pesan (*message*) dalam proses komunikasi, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut simbol dan kode, karena pesan dikirim komunikator kepada penerima terdiri atas rangkai simbol dan kode. Sebagai makhluk sosial dan makhluk komunikasi, manusia dalam hidupnya diliputi oleh berbagai macam simbol, baik yang diciptakan oleh manusia itu maupun yang bersifat alami.

a. Pesan verbal dalam komunikasi

Komunikasi verbal ialah suatu bentuk kegiatan percakapan atau penyampaian pesan maupun informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik itu dilakukan secara lisan maupun dengan cara tertulis.

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Dalam komunikasi verbal itu bahasa memegang peranan penting.⁴

Jenis komunikasi verbal terbagi atas dua kategori besar yaitu berbicara dan menulis; mendengarkan dan membaca. Berbicara adalah komunikasi verbal-vokal. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal-non vokal. Contoh komunikasi verbal-vokal adalah presentasi dalam rapat dan contoh komunikasi verbal-non vokal adalah surat-menyurat bisnis.

Mendengar dan mendengarkan berbeda, mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang di dengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang

⁴Agus M. Hardjana, "Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal", (Yogyakarta, Kanisius, 2003),. Hal 22.

ditulis. Contoh surat-menyurat, berbicara melalui telepon, presentasi tugas di depan kelas kepada teman, membaca koran, majalah dan menonton televisi, mendengarkan siaran radio, dan lain sebagainya.

Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu:

a. Bahasa

Pada dasarnya bahasa adalah suatu system lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal entah lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan hubungan antara warganya satu sama lain.

Bahasa memiliki banyak fungsi, namun sekurang-kurangnya ada tiga fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ketiga fungsi itu adalah untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita, membina hubungan yang baik di antara sesama manusia, Untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia.

Pesan verbal dalam pemakaiannya, menggunakan bahasa. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti.

Bahasa mempunyai banyak fungsi, bahasa mempunyai tiga fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif, yaitu:

- 1) Untuk mempelajari tentang dunia sekeliling
- 2) Untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia.
- 3) Untuk mempelajari dunia sekeliling kita, bahasa menjadi peralatan yang sangat penting untuk memahami lingkungan. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui sikap, perilaku dan pandangan suatu bangsa, meski kita belum pernah berkunjung ke negaranya.

Bahasa mengembangkan pengetahuan kita, agar kita dapat menerima sesuatu dari luar dan juga berusaha untuk menggambarkan ide-ide kita kepada orang lain. sebagai alat pengikat dan perekat dalam hidup bermasyarakat, bahasa dapat membantu kita menyusun struktur pengetahuan menjadi logis dan mudah diterima oleh orang lain. Sebab bagaimanapun bagusya sebuah ide, kalau tidak disusun dengan bahasa yang sistematis sesuai dengan aturan yang telah diterima, maka ide yang baik itu akan menjadi kacau.

b. Pesan non-verbal dalam komunikasi

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan.⁵

⁵Agus M. Hardjana, ”*Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*”, (Yogyakarta, Kanisius, 2003), Hal 26.

Komunikasi nonverbal adalah semua aspek komunikasi selain kata-kata sendiri. Ini mencakup bagaimana kita mengucapkan kata-kata (infleksi, volume), fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi (suhu, pencahayaan), dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi (pakaian, perhiasan, mebel).

Komunikasi non verbal dapat berupa bahasa tubuh, tanda (sign), tindakan/perbuatan (action) atau objek (object).⁶

Bahasa Tubuh. Bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak tangan,, gerak-gerik tubuh mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, isi pikiran, kehendak, dan sikap orang.

Tanda. Dalam komunikasi nonverbal tanda mengganti kata-kata, misalnya, bendera, rambu-rambu lalu lintas darat, laut, udara; aba-aba dalam olahraga.

Tindakan/perbuatan. Ini sebenarnya tidak khusus dimaksudkan mengganti kata-kata, tetapi dapat menghantarkan makna. Misalnya, menggebrak meja dalam pembicaraan, menutup pintu keras-keras pada waktu meninggalkan rumah, menekan gas mobil kuat-kuat. Semua itu mengandung makna tersendiri.

Objek. Objek sebagai bentuk komunikasi nonverbal juga tidak mengganti kata, tetapi dapat menyampaikan arti tertentu. Misalnya, pakaian, aksesoris dandan, rumah, perabot rumah, harta benda, kendaraan, hadiah.

⁶Faisal Wibowo, “Komunikasi Verbal dan Nonverbal”, <http://faisal-wibowo.blogspot.co.id/2013/01/komunikasi-verbal-dan-nonverbal.html> (24 September 2017)

Hal menarik dari komunikasi nonverbal ialah studi Albert Mehrabian (1971) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7% berasal dari bahasa verbal, 38% dari vocal suara, dan 55% dari ekspresi muka. Ia juga menambahkan bahwa jika terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan seseorang dengan perbuatannya, orang lain cenderung mempercayai hal-hal yang bersifat nonverbal.⁷Oleh sebab itu, Mark Knapp (1978) menyebut bahwa penggunaan kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi untuk meyakinkan apa yang diucapkannya (*repetition*), menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata (*substitution*), menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya (*identity*), menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna..

Contoh komunikasi non verbal memakai bahasa tubuh, seperti mengangguk-anggukkan kepala dan lain sebagainya, ekspresi wajah, seperti dengan senyuman, tertawa dan lain sebagainya, memakai simbol atau lambang-lambang, seperti pada pakaian yang sedang dipakainya memberikan petunjuk identitas pemakainya.

Meskipun komunikasi verbal dan nonverbal memiliki perbedaan-perbedaan, namun keduanya dibutuhkan untuk berlangsungnya tindak komunikasi yang efektif. Fungsi dari lambang-lambang verbal maupun nonverbal adalah untuk memproduksi makna yang komunikatif.

⁷Faisal Wibowo, “Komunikasi Verbal dan Nonverbal”, <http://faisal-wibowo.blogspot.co.id/2013/01/komunikasi-verbal-dan-nonverbal.html> (24 September 2017)

Secara historis, kode nonverbal sebagai suatu multi saluran akan mengubah pesan verbal melalui enam fungsi: pengulangan (*repetition*), berlawanan (*contradiction*), pengganti (*substitution*), pengaturan (*regulation*), penekanan (*accentuation*) dan pelengkap (*complementation*). Dalam tahun 1965, Paul Ekman menjelaskan bahwa pesan nonverbal akan mengulang atau meneguhkan pesan verbal. Misalnya dalam suatu lelang, kita mengacungkan satu jari untuk menunjukkan jumlah tawaran yang kita minta, sementara secara verbal kita mengatakan "satu".

Pesan-pesan nonverbal juga berfungsi untuk mengkontradiksikan atau menegaskan pesan verbal seperti dalam sarkasme atau sindirian-sindiran tajam. Kadang-kadang, komunikasi nonverbal mengganti pesan verbal. Misalnya, tidak perlu secara verbal menyatakan kata "menang", namun cukup hanya mengacungkan dua jari membentuk huruf 'V' (*victory*) yang bermakna kemenangan.

Fungsi lain dari komunikasi nonverbal adalah mengatur pesan verbal. Pesan-pesan nonverbal berfungsi untuk mengendalikan sebuah interaksi dalam suatu cara yang sesuai dan halus, seperti misalnya anggukan kepala selama percakapan berlangsung. Selain itu, komunikasi nonverbal juga memberi penekanan kepada pesan verbal, seperti mengacungkan kepala tangan. Fungsi komunikasi nonverbal adalah pelengkap pesan verbal dengan mengubah pesan verbal, seperti tersenyum untuk menunjukkan rasa bahagia kita.

Manusia dalam berkomunikasi selain memakai kode verbal (bahasa) juga memakai kode non-verbal. Pesan nonverbal bisa disebut bahasa isyarat atau bahasa diam (*silent language*).⁸

Pesan nonverbal yang digunakan dalam berkomunikasi, sudah lama menarik perhatian di kalangan antropologi, bahasa, bahkan dari bidang kedokteran. menyebut bahwa penggunaan pesan nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi:

- 1) Meyakinkan apa yang telah diucapkan (*repetition*)
- 2) Menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
- 3) Menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya (*identity*)
- 4) Menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna.

Pemberian arti terhadap pesan nonverbal sangat dipengaruhi oleh sistem sosial budaya masyarakat yang menggunakannya.⁹

f. Saluran

Saluran komunikasi merupakan sarana untuk mengangkut atau memindahkan pesan dari pengirim kepada penerima. Dalam komunikasi, semua pesan yang dikirimkan harus melalui saluran, saluran bisa saja tunggal namun bisa juga banyak, misalnya pada sarana transportasi seperti mobil pengangkut barang atau manusia,

⁸[http://pengertianmenurutahli.blogspot.co.id/2013/10/pesan-dalam-proses komunikasi.html](http://pengertianmenurutahli.blogspot.co.id/2013/10/pesan-dalam-proses-komunikasi.html)
diakses pada tanggal 28 januari 2017

⁹<http://pengertianmenurutahli.blogspot.co.id/2013/10/pesan-dalam-proses-komunikasi.html>
diakses pada tanggal 28 januari 2017

fungsi sarana ini adalah mengangkut atau memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain, sebagai sarana yang juga bisa digunakan, seperti kuda, sepeda motor, kapal feri ataupun pesawat, begitupun dengan saluran komunikasi. Komunikasi secara seksama dilakukan melalui bahan cetakan seperti buku, email, atau telepon.

g. *Noise*

Komunikasi manusia tidaklah selalu lancar, komunikasi sering mengalami hambatan, gangguan atau distorsi. Mengingat perkembangan model awal komunikasi berbasis pada teknik-teknik matematika maka Shannon dan Weaver mengartikan konsep *noise* sebagai kebisingan. Misalnya seseorang berdiri di tepi trotoar dan menelpon dengan menggunakan telepon seluler, orang tersebut mengalami kebisingan karena hiruk mudik kendaraan di jalan raya. Jika suara kebisingan semakin keras, maka semakin sulit mengirimkan pesan dan semakin sulit pula menerima pesan, apalagi memahami maksud dan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan.

Keseluruhan komponen komunikasi tersebut berlaku pada bentuk-bentuk komunikasi. Adapun bentuk-bentuk komunikasi yaitu:

a. Komunikasi Antarpribadi

R. Wayne Pace mengemukakan komunikasi interpersonal atau *communication interpersonal* adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka dimana pengirim pesan dapat menyampaikan pesan kepada penerima pesan secara langsung dan menanggapi dengan langsung. Komunikasi interpersonal bukan hanya sekedar

serangkaian rangsangan, tanggapan, stimulus-respon, akan tetapi serangkaian proses saling menerima, dan penyampaian tanggapan yang telah diolah oleh masing-masing pihak.¹⁰

Adapun komunikasi antarpribadi atau *interpersonal communication* menurut Burhan Bungin adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun *non verbal*.¹¹

Menurut Devito sebagaimana dikutip oleh Onong Uchjana Effendy oleh Suranto Aw dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi Interpersonal”, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan seseorang kepada orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampak dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera.¹²

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih dari suatu kelompok manusia kecil dengan berbagai efek dan umpan balik (*feedback*).¹³

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang terjadi secara dialogis, dimana saat seorang komunikator berbicara maka akan terjadi umpan balik dari komunikan sehingga terdapat interaksi. Dalam komunikasi dialogis, baik

¹⁰Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011) h.32

¹¹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.73

¹² J.A Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, (Jakarta : Profesional Books, 2002), h.231

¹³ W.A. Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta: Bumi Askara), h.17

komunikator maupun komunikan, keduanya aktif dalam proses pertukaran informasi.

Dapat dipahami bahwa komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses penyampaian dan penerimaan antara pengirim (*sender*) dengan penerima pesan (*receiver*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung yaitu apabila pihak-pihak yang terlibat komunikasi dapat saling memberi informasi tanpa melalui media. Sedangkan komunikasi tidak langsung yaitu adanya penggunaan media tertentu.

Agar komunikasi interpersonal yang dilakukan menghasilkan hubungan interpersonal yang efektif dan kerjasama bisa ditingkatkan maka perlu bersikap terbuka, sikap percaya, dan sikap mendukung yang dapat mendorong timbulnya sikap yang saling memahami, menghargai, dan saling mengembangkan kualitas. Hubungan interpersonal perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan dengan memperbaiki hubungan dan kerjasama antara berbagai pihak.

Komunikasi antarpribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi ini merupakan suatu proses bersifat psikologis karena merupakan permulaan dari ikatan psikologis antarmanusia yang memiliki suatu pribadi.

b. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung diantara anggota-anggota suatu kelompok. Pada tingkatan ini, tiap individu yang terlibat masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan

kedudukannya dalam kelompok. Pesan atau informasi yang dikomunikasikan juga menyangkut semua kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan bersifat pribadi misalnya: ngobrol-ngobrol dalam keluarga antar bapak, ibu dan anak-anaknya, diskusi dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan seorang guru dengan murid-muridnya di dalam kelas.¹⁴

Komunikasi sebagai proses tukar menukar informasi mempunyai fungsi yang sangat besar dalam kehidupan sosial. Harold D.Laswell menyebutkan beberapa fungsi komunikasi sebagai berikut:

- a. pengamatan terhadap lingkungan (*the surveillance the environment*), penyikapan ancaman dan kesempatan yang mempengaruhi nilai masyarakat dan bagian unsur di dalamnya.
- b. Kolerasi unsur-unsur masyarakat ketika menanggapi lingkungan (*correlation of the components of society in making an response to the enviroenment*)
- c. Penyebaran warisan sosial (*transmission of the social inheritance*). Disini berperan para pendidik, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun sekolah, yang meneruskan warisan sosial kepada keturunn berikutnya.

Berdasarkan fungsi yang dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa fungsi komunikasi, memegang peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Demikian pula strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi

¹⁴ Sasa Djuarsa Sendjaja, *Pengantar Komunikasi*, (Cet ke-4; Jakarta: Universitas Terbuka 1993), h. 39

¹⁵ Arifuddin Tike, h.23-24.

(*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan dan ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan.

B. Komunikasi Pembangunan

Konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan terbatas. Dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) di antara semua pihak yang terlihat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Sedang dalam arti yang sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan yang disampaikan tadi.

Quebral dan Gomez (1976) mengatakan, bahwa komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan

pembangunan manusiawi, dan itu berarti komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan.¹⁶

Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Secara pragmatis, kata Quebral, dapatlah dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara.

Sebelum itu, Quebral (1973) menegaskan bahwa komunikasi pembangunan merupakan salah satu terobosan (break through) di lingkungan ilmu-ilmu sosial. Seperti mana terobosan lainnya, komunikasi pembangunan pada dasarnya merupakan gagasan dan konsep yang tidak mudah untuk diapresiasi atau dipahami sampai kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan. Di lingkungan ilmu-ilmu sosial, terobosan bukan merupakan obyek-obyek material yang dapat dilihat atau digenggam. Begitu pula halnya dengan komunikasi pembangunan. Karena itu menurut Quebral, komunikasi pembangunan sendiri merupakan suatu inovasi yang harus diusahakan agar diketahui orang dan diterima, sebelum ia digunakan.¹⁷

Perkembangan pemikiran mengenai pemanfaatan dan peranan komunikasi dalam melaksanakan usaha membangun masyarakat memperlihatkan hubungan yang langsung dengan konsepsi yang dianut dalam merencanakan dan menafsirkan

¹⁶ Zulkarimen Nasution, "*Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.142

¹⁷ Zulkarimen Nasution, "*Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*", h.142

“pembangunan” itu sendiri. Dengan demikian, rumusan tentang pemanfaatan komunikasi ataupun peran yang diharapkan darinya dalam suatu usaha pembangunan amat ditentukan oleh model pembangunan yang dilaksanakan itu sendiri.

Secara teoritis, ketika itu pula dikenal teori pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi (economic growth) sebagai tujuan yang utama. Singkatnya, ketika itu yang penting adalah bahwa disuatu negara terjadi pembangunan ekonomi dan fisik secara besar-besaran, yang diharapkan segera mendatangkan suasana kemakmuran bagi rakyatnya.

Dalam mengaitkan peranan komunikasi dalam pembangunan dan konsep mengenai pembangunan itu sendiri, Tehranian (1979) mengemukakan tiga tinjauan teoritis. Yang pertama adalah teori yang melihat pembangunan semata-mata sebagai proses pluralisasi masyarakat, politik, dan ekonomi dari suatu bangsa yang melaksanakan pembangunan tersebut. Pandangan ini pada umumnya dianut oleh para ekonom dan politisi liberal beserta para pengikutnya. Pada pokoknya mereka ini berpandangan bahwa hal-hal yang terpenting dalam suatu pembangunan adalah peningkatan pengelompokan tenaga kerja, diperbedakannya (diferensiasi) masyarakat menurut struktur dan fungsi yang jelas perbedaannya (distinktif), penganekaragaman (diversifikasi) pengelompokan berdasarkan kepentingan (interest group), dan keseimbangan yang dinamis antarberbagai kelompok dan kepentingan yang berkompetisi.¹⁸

¹⁸ Zulkarimen Nasution, *“Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya”*, h.144

Teori kedua, memberi penekanan pada ditingkatkannya rasionalisasi sebagai unsur kunci (key elemen) proses pembangunan. Ke dalam kelompok ini termasuk Hegel dan pengikutnya yang menekankan pentingnya peranan rasio dalam proses perkembangan sejarah. Selain itu, juga Marx dan kaum Marxis dengan pandangan mereka mengenai peran kunci kemajuan teknologi dalam pembentangan sejarah yang progresif. Kemudian termasuk pula Weber dan para pengikutnya yang mementingkan rasionalisasi kebudayaan dan birokrasi sebagai “mesin kembar” dari suatu proses sosial. Yang belakangan ini bahkan dikenal mendewakan negara sebagai sumber segala kewenangan dan keabsahan; sehingga apa yang dicirikan oleh kaum totaliter dan teknologi kras dengan dalih prinsip tersebut dikenal sebagai penggampangan (vulgarisasi) dari aliran pemikiran ini.

Sedangkan teori ketiga, adalah pemikiran yang lahir dari kesadaran diri masyarakat di Dunia Ketiga, dengan konsep yang bertitik pusat pada prinsip melakukan pembebasan (liberation). Teori pembangunan yang ini amat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh dari “Mazhab Frankfurt” yang disebut juga sebagai aliran neoMarxis. Di antara tokoh-tokoh pemikiran dalam aliran ini adalah Freire, Illich, Frank, Galtung, dan sebagainya.

Andaikata disederhanakan, maka pengertian pembangunan menurut masing-masing aliran tadi adalah:

Teori Pertama: Pembangunan bertujuan utama meningkatkan penghasilan atau pendapatan masyarakat yang melaksanakan pembangunan tersebut. Konsep pembangunan ini tidak memperdulikan apakah misalnya peningkatan pendapatan tadi

dinikmati oleh bagian terbesar anggota masyarakat yang membangun itu, ataukah hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Pokoknya, yang penting telah terjadi peningkatan. Begitu pula dengan dimensi pembangunan itu sendiri, yang menjadi perhatian utama adalah segi materi atau jasmaniah dari kehidupan masyarakat.

Teori kedua: pembangunan justru menomorsatukan hal-hal yang bersifat abstrak, yakni rasio, cara berpikir, dan bukan yang lain-lainnya yang berbentuk nyata wujudnya.

Setelah merasakan sendiri berbagai pengalaman pelaksanaan pembangunan baik menurut aliran pertama, maupun yang kedua tadi, maka di negara-negara Dunia Ketiga muncul kesadaran diri mengenai hakikat dan arti dan tujuan yang bersifat dasar dari pembangunan itu sendiri.

Hakikat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan di mana pembangunan itu harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan diartikan pula sebagai kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat untuk mencapai suatu kondisi dan situasi yang lebih baik yang meliputi bidang aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan nasional, bangsa Indonesia berusaha meningkatkan derajat kemanusiaannya sebagai bangsa yang memiliki kepribadian, sebagai bangsa yang

memiliki harga diri, karena pembangunan nasional tidak lain adalah usaha bangsa Indonesia untuk lebih meningkat dalam aspek pembangunan karena diketahui bersama bahwa pembangunan dunia senantiasa mengalami perubahan, sehingga masyarakat Indonesia dapat meningkatkan derajat sebagai masyarakat Indonesia.¹⁹

Komunikasi pembangunan adalah proses sosial yang direkayasa, yang kata intinya adalah perubahan sosial, rekayasa sosial model pembangunan terjadi besar-besaran di negara Dunia ke-3. Pembangunan berkisar pada bagaimana mengubah suatu masyarakat dengan mengubah sistem ekonominya.²⁰

1. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik pemerintah swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan berkaitan aspek-aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara:

- a. Terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan.
- c. Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi).
- d. Melaksanakannya dengan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²¹

¹⁹ Sahroni, dkk, *"Perencanaan Pembangunan Daerah"*, (Jakarta: GTZ-Usaid, 2000) h.12

²⁰ Sahroni, *"Perencanaan Pembangunan Daerah"*, dkk, h.15

²¹ Sahroni, *"Perencanaan Pembangunan Daerah"*, dkk, h.18.

Kondisi yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan dapat dikelompokkan kedalam dua aspek yaitu pertama, yang berkaitan dengan aspek epistemologi, misalnya berupa pengetahuan dan teknologi yang kita miliki yang berkaitan dengan proses perencanaan sedangkan yang kedua adalah yang berkaitan dengan aspek axiologi, seperti nilai dan tujuan pembangunan itu sendiri

Kedua aspek tersebut dipetakan dalam 3 (tiga) kawasan. Pertama menunjukkan kawasan dimana tingkat pengetahuan dan teknologi yang kita miliki relatif memadai dibandingkan dengan nilai dan tujuan pembangunan yang pada umumnya juga terdefinisi dengan baik. Pada kawasan ini digunakan perencanaan pembangunan yang tergolong dalam model rasional, komprehensif, dimana dominasi para perencana dalam penyusunan rencana pembangunan, umumnya sangat menonjol. Kawasan kedua, mewakili kondisi dimana tingkat pengetahuan dan teknologi tidak sepenuhnya dapat menangani nilai dan tujuan pembangunan yang juga semakin kompleks, berhubung semakin tingginya ketidakpastian yang dihadapi. Oleh karena itu, digunakan model perencanaan pembangunan partisipasi yang melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat, dengan harapan akan mampu mengurangi resiko akibat ketidakpastian, kawasan ketiga, mewakili kondisi dimana pengetahuan dan teknologi di bidang perencanaan pembangunan sudah sangat tidak memadai karena semakin meningkatnya kompleksitas pembangunan pada kawasan ini, alternatif pendekatan pembangunan yang digunakan adalah model perencanaan adaptif, yaitu model perencanaan yang secara kontinyu melakukan modifikasi

terhadap rencana pembangunannya agar senantiasa sesuai dengan kondisi lingkungan strategisnya.²²

Perspektif ideal yang diharapkan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat sebagai salah satu stakeholders kunci, diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan, sehingga akan tercipta sinergi berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata nilai dan budaya/kultur yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam proses perencanaan pembangunan haruslah dimulai dengan upaya menjadikan masyarakat akar rumput sebagai pihak yang harus mulai mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan segala prioritas yang ditentukan sendiri, dalam wujud peran dan fungsinya turut serta menyampaikan pendapat, mengidentifikasi dan menentukan alternatif pemecahan masalah-masalah pembangunan, termasuk di dalamnya membangun bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan untuk lebih mengekspresikan kepentingan dan aspirasi komunitasnya, sehingga apa yang menjadi rencana pemerintah akan berhasil secara

²² A.Mappadjantji Amien, *"Kemandirian Lokal, Perspektif Sains Baru Terhadap Organisasi, Pembangunan dan Pendidikan"*, (Jakarta: 2003) h.52.

efektif, dalam arti mencapai tujuan yang direncanakan serta mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dan berbagi tanggung jawab untuk pencapaian tujuan itu.²³

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Salah satu bentuk perencanaan pembangunan adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Pembangunan tidak akan mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Sebaliknya, akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak cukup hanya dengan menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi masyarakat desa yang penuh dengan keterbatasan-keterbatasan perlu didorong atau digerakkan. Keberadaan

²³Martini M, *Skripsi "Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Bantaeng (Survey di Kecamatan Bantaeng)*, 2010, h.22.

Musrenbang secara resmi dalam proses perencanaan adalah satu kesempatan untuk benar-benar menerapkan prinsip pendekatan *bottom up* yakni partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional diawali dari tingkat desa hingga tingkat provinsi dimana masyarakat desa terlibat aktif dalam menyampaikan usulan-usulan program di desanya. Dengan musrenbang ini, rakyat diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan yang digagas dari bawah karena prinsip *bottom up* menekankan partisipasi masyarakat.²⁴

Perkembangan pemikiran mengenai pemanfaatan dan peranan komunikasi dalam melaksanakan usaha membangun masyarakat memperlihatkan hubungan yang langsung dengan konsepsi yang dianut dalam merencanakan dan menafsirkan “pembangunan” itu sendiri. Dengan demikian, *rumusan tentang pemanfaatan komunikasi ataupun peran yang diharapkan darinya dalam suatu usaha pembangunan amat ditentukan oleh model pembangunan yang dilaksanakan itu sendiri*. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah ini, dapat dilihat dari perkembangan konsep pembangunan sejak masa tahun 50-an sampai pada saat sekarang ini.²⁵

Peran utama dukungan komunikasi adalah untuk membantu menciptakan lingkungan manusiawi (human environment) yang diperlukan untuk berhasilnya suatu proyek atau program pembangunan. Lebih spesifik lagi, dukungan tersebut

²⁴ Deddy M, “*Komunikasi Pembangunan Partisipatif*”
(<http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/64650/1/I13rru.pdf> /13/08/2017)

²⁵ Zulkarimen Naasution, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, h. 143

menyelenggarakan aktivitas informasi, motivasi dan edukasi yang dibutuhkan untuk mengubah segala ketidakperdulian terhadap proyek yang masyarakat setempat mungkin mempunyai kepentingan dan komitmen, ketidakacuan akan pengetahuan, opisisi akan penerimaan dan dukungan, dan mengubah sikap mental atau kebiasaan yang tadinya digerakkan menentang perubahan, kepada sikap dan kebiasaan yang mendorong.²⁶

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi merupakan bentuk komunikasi masyarakat dengan pemerintah dalam hal pembangunan. Partisipasi dimaknai sebagai suatu aktifitas yang direncanakan yang didasarkan pada proses-proses partisipatif di satu sisi, dan pemanfaatan media komunikasi dan komunikasi tatapmuka di sisi lain, dengan tujuan untuk memfasilitasi dialog di antara pemangku kepentingan yang berbeda, yang berkisar pada perumusan masalah atau sasaran pembangunan bersama, mengembangkan dan melaksanakan atau menjabarkan seperangkat aktifitas yang memberi kontribusi untuk mencari solusi yang didukung bersama.

Proses-proses partisipatif yang dimaksud adalah adanya partisipasi komunitas, yakni adanya keterlibatan aktif kelompok komunitas yang berbeda, bersama-sama pemangku kepentingan lainnya dan beberapa agen pembangunan serta peneliti yang bekerja dengan komunitas serta para pengambil keputusan. Secara umum yang

²⁶Zulkarimen Naasution, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, h.194

dimaksud dengan pemangku kepentingan antara lain anggota komunitas (masyarakat), kelompok-kelompok masyarakat yang aktif, aparat pemerintah lokal atau regional, LSM, petugas teknis pemerintah atau lembaga lainnya yang bekerja di tingkat komunitas, para pembuat kebijakan yang semestinya terlibat dalam upaya pembangunan yang berlangsung.

Makna komunikasi sendiri mengalami perubahan karena adanya pergeseran peran dari yang fokusnya menginformasikan dan membujuk rakyat untuk mau mengubah perilaku atau sikap, kepada menyediakan fasilitas di antara pemangku kepentingan yang berbeda untuk menentukan masalah bersama. Artinya dari pendekatan topdown, linier dan searah menuju pendekatan horisontal, interaktif dan dialogis. Komunikasi menjadi lebih berorientasi kepada receiver (khalayak penerima) ketimbang kepada sender (sumber). Proses ini dapat berlangsung ketika yang menjadi titik masuknya adalah bukan hanya pada masalah pembangunan itu sendiri, tetapi sasaran atau tujuan yang ditentukan bersama di tingkat komunitas.

Pergeseran makna komunikasi memberi konsekuensi pada peranan baru komunikasi yang lebih ditekankan pada kebutuhan untuk membantu seluruh proses melalui pertukaran informasi secara interaktif atau transaksional. Rakyat (komunitas) sendiri yang semestinya mengidentifikasi kebutuhan akan informasi dan komunikasi. Rakyat diposisikan sebagai mitra sejajar dalam mengembangkan pesan dan memproduksi media komunikasi. Melalui komunikasi partisipatif pula dapat

mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di antara kelompok, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya.²⁷

Partisipasi menunjukkan adanya situasi interaktif antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Namun demikian yang sangat ditekankan dalam partisipasi ini adalah adanya keseimbangan pertukaran informasi antaranggota kelompok, kualitas pemahaman makna bersama atas ide-ide yang muncul dari setiap partisipan.

Istilah partisipasi pada dasarnya istilah yang diserap dari bahasa inggris “participation” yang berarti turut ambil bagian dalam suatu kegiatan dengan kemauan sendiri, berupa turut merencanakan menyusun dan turut pula bertanggung jawab.²⁸

1. Partisipasi buah pikiran, adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu komunitas atau organisasi dalam bentuk ide-ide pemikiran, baik dalam tahapan pra rencana, maupun dalam penyusunan rencana serta implementasinya, seperti ikut dalam pertemuan dan rapat ataupun melakukan kritik dan saran atas apa yang sedang akan dilaksanakan.
2. Partisipasi tenaga, adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan untuk kepentingan bersama, yang umumnya dalam bentuk gotong royong, seperti aktif dalam perbaikan-perbaikan saluran-saluran air (drainase), pos kamling, sarana ibadah dan lain-lain sebagainya.

²⁷Hadiyanto, “*Komunikasi Pembangunan Partisipatif: Sebuah Pengenalan Awal*”, Departement Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2008. (http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnal_kmp/article/viewfile/5670/4301) diakses pada tanggal 22 oktober 2017 10:43

²⁸ Moch. Solechkan, “*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”. (Setara Press, Malang. 2017)

3. Partisipasi harta benda (materi), yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dilingkungannya dalam bentuk memberikan sumbangan harta benda berupa uang atau materi baik sukarela maupun sedikit mobilisasi.
4. Partisipasi keterampilan, yaitu keterlibatan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan keterampilan atau keahlian yang dimilikinya, seperti keahlian dalam bidang perencanaan, menggambar (arsitek), keahlian bidang pertukangan (tukang batu, tukang kayu) dan lain-lain sebagainya.

Bentuk partisipasi kualitatif dalam pembangunan dapat diukur dengan:

1. Pelaksanaan fungsi tanggung jawab sosial yang mencakup bentuk sosial, partisipasi sosial dan bentuk sosial yang terwujud lewat bantuan materil dan moril.
2. Pengembangan pekerjaan tetap dengan penuh tanggung jawab.
3. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan diri dan keluarga.
4. Pengembangan terhadap usaha-usaha perubahan dan pembaharuan.²⁹

Partisipasi masyarakat terhadap pemerintah akan sangat ditentukan oleh iklim yang diciptakan oleh pemerintah itu. Jika iklim demokrasi yang diciptakan, maka partisipasinya akan terwujud dengan sukarela dan bukan partisipasi yang dimobilisasi atau diarahkan. Sebaliknya, bila iklim otoriter sentralistik yang diciptakan maka akan melahirkan suasana partisipasi semu, dimana masyarakat hanya terlibat secara fisik dalam setiap program kegiatan, sedangkan mental dan emosinya tidak terlibat.

²⁹ Martini M, Skripsi “*Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Bantaeng (Survey di Kecamatan Bantaeng)*”, h.09-10.

Oleh karenanya dalam setiap pemerintahan yang demokratis, partisipasi masyarakat merupakan suatu yang niscaya diperlukan. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelolah ke pemerintahannya, haruslah selalu bersandar pada apa yang menjadi aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus menganggap bahwa mengakomodasi atau melayani aspirasi masyarakat merupakan kewajiban mutlak, sementara keikutsertaan masyarakat dalam segala dan atau sepanjang proses penyelenggaraan pemerintah merupakan hak yang harus dijamin adanya.

Partisipasi adalah tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi anggota sistem sosial dalam pembuatan keputusan berhubungan positif dengan kepuasan mereka terhadap keputusan inovasi kolektif. Ini berarti bahwa semakin tinggi partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tingkat kepuasan mereka terhadap keputusan.

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembangunan sangat diperlukan, karena pembangunan yang berhasil harus didukung oleh semua komponen bangsa, agar masyarakat memiliki *sense of belonging* (rasa memiliki) dan *sense of responsibility* (rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri).³⁰

³⁰ H. Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto, “*Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial Perspektif Dominan, Kaji ulang, dan Teori Kritis*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.249

Dalam strategi partisipasi ini, prinsip-prinsip penting dalam mengorganisasi kegiatan adalah kerja sama komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community participation and personal growth*). Yang dipentingkan dalam strategi ini bukan pada berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui program komunikasi pembangunan, tetapi lebih pada pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat (*equal*) dalam proses berbagai pengetahuan atau keterampilan.³¹

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Verhagen menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari suatu interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

1. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki.
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya

³¹ H. Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto, “*Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial Perspektif Dominan, Kaji ulang, dan Teori Kritis*”, h.166

pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Telaahan tentang partisipasi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peranserta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan suka rela, baik karena alasan-alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu, Yadav (UNAPDI, 1980), mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat, (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin/masyarakat menengah ke bawah) untuk secara suka rela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri dari orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangsi secara proporsional.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan atau beragam bentuk pengorbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Disamping itu, yang sering dilupakan dalam pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai serta diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Hal ini merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Sayangnya, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasaran. Padahal, seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

Selain daripada beberapa hal diatas, dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka upaya penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dalam praktiknya dilakukan melalui kegiatan komunikasi pembangunan. Tentang hal ini, harus dipahami bahwa tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekadar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan pembangunan saja, tetapi yang lebih penting dari itu

adalah menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, komunikasi pembangunan merupakan cara yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.³²

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi baru akan tumbuh jika masyarakat telah mengetahui tentang:

- a. Adanya masalah yang sedang dihadapi dan memerlukan upaya pemecahannya.
- b. Adanya kemampuan masyarakat sendiri untuk memecahkan masalahnya sendiri.
- c. Pentingnya partisipasi setiap warga masyarakat dalam pemecahan masalah tersebut melalui suatu kegiatan pembangunan.
- d. Adanya kepercayaan dalam diri setiap warga masyarakat yang bersangkutan bahwa mereka mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan tersebut.

Setiap kegiatan komunikasi pembangunan harus mampu menyampaikan pesan-pesan informatif dan persuasif yang relevan dengan keempat unsur tersebut, sehingga mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan menjamin terpeliharanya hubungan antar individu.

2. Menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Sering kali terjadi, bahwa partisipasi masyarakat tidak nampak karena mereka merasa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi atau dibenarkan berpartisipasi,

³² H. Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto, “*Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial Perspektif Dominan, Kaji ulang, dan Teori Kritis*”, h.168

khususnya yang menyangkut pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan yang akan dicapai.

Karena itu, melalui komunikasi pembangunan harus dijelaskan tentang segala hak dan kewajiban setiap warga masyarakat di dalam proses pembangunan yang dilaksanakan, serta pada bagian kegiatan apa mereka diharapkan partisipasinya, dan apa bentuk partisipasinya yang diharapkan (tenaga, uang, materi, dan lain-lain) dari masyarakat.

3. Menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Ketidak munculan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga dapat terjadi karena mereka tidak cukup memiliki atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Sehubungan dengan itu, melalui komunikasi pembangunan, kepada masyarakat harus ditunjukkan adanya:

- a. Kemampuan yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Berbagai potensi atau peluang yang dapat dimanfaatkan agar masyarakat yang bersangkutan dapat dan mampu berpartisipasi.
- c. Berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) agar mereka dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan.

4. Menggerakkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi

Keadaan umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah karena mereka hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberikan imput, tanpa mengetahui dengan jelas tentang manfaat apa yang akan mereka peroleh dan rasakan (secara langsung atau tidak langsung).

Disamping itu, mereka juga tidak atau kurang diberi informasi yang jelas tentang kesempatan-kesempatan yang disediakan baginya untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang akan dicapai di masa mendatang. Oleh sebab itu, melalui komunikasi pembangunan dengan pendekatan persuasif harus dapat dijelaskan tentang manfaat serta kesempatan yang tersedia atau diberikan kepada masyarakat, untuk menerima atau merasakan manfaat dari hasil pembangunan tersebut.

Berkaitan dengan manfaat dari pembangunan tersebut, seringkali bukan karena belum dikomunikasikan, tetapi juga tergantung pada sifat jauh atau dekatnya manfaat yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

D. MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah yang sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 bahwasannya musrenbang menjadi forum bagi antar pelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya dalam pasal 2

ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dengan memiliki jenjang perencanaan yang berbeda, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu perencanaan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD untuk periode 20 tahun (pasal 1 ayat 9), selanjutnya rencana jangka menengah daerah yang disebut RPJMD untuk periode 5 tahun (pasal 1 ayat 12) , maupun rencana jangka pendek atau tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah yang biasa disebut RKPD 1 tahun (pasal 1 ayat 16) Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga atas.

Pelaksanaan musrenbang diawali dengan musrenbang kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, lalu musrenbang pada tingkat kabupaten/kota kemudian musrenbang provinsi, selanjutnya Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 68 pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat nasional.³³

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari penetapan wadah perencanaan yang diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 0259/M.PPN/I/2005

³³Bekti, “Musrenbang: Musyawarah Perencanaan Pembangunan”, (Journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp8e487ca97cfull.html) diakses pada tanggal 25 oktober 2017 Pukul 21.01

dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005. Wadah perencanaan yang dimaksud dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dengan menitikberatkan kepada konsultasi informal. Dalam konteks ini, keterlibatan para tokoh masyarakat, LSM, Kelompok Tani, organisasi pedagang dan organisasi masyarakat lainnya menjadi sangat penting untuk menjaring dan merumuskan setiap usulan rencana kegiatan pembangunan baik ditingkat desa/kelurahan maupun ditingkat kecamatan.

Perspektif ideal yang diharapkan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat sebagai salah satu stakeholders kunci, diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan, sehingga akan tercipta sinergi berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata nilai dan budaya/kultur yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam proses perencanaan pembangunan haruslah dimulai dengan upaya menjadikan masyarakat akar rumput sebagai pihak yang harus mulai mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan segala prioritas yang ditentukan sendiri dalam wujud peran dan fungsinya turut serta menyampaikan pendapat, mengidentifikasi dan menentukan alternatif pemecahan masalah-masalah pembangunan, termasuk di dalamnya membangun bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan untuk lebih mengekspresikan kepentingan dan aspirasi komunitasnya, sehingga apa yang menjadi rencana pemerintah akan berhasil secara

efektif, dalam arti mencapai tujuan yang direncanakan serta mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dan berbagi tanggung jawab untuk pencapaian tujuan itu.

Upaya untuk mewujudkan mekanisme perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan dari atas ke bawah (*top-down*) serta untuk lebih komprehensif dan terpadu sehingga dapat tercapai titik temu antara aspirasi dan kebutuhan daerah yang mendesak dengan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional, oleh pemerintah telah dikeluarkan peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0259/M.PPN/I/2005 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005. Tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang tahun 2005.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas dalam lingkup kabupaten / kota secara garis besar sebagai berikut:

- a. Tingkat Desa / kelurahan

Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan diawali dengan tahap persiapan berupa musyawarah di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani/nelayan, kelompok pemuda, kelompok perempuan perempuan, dan lain-lain kelompok masyarakat) yang merupakan *stakeholder* di wilayah dusun/RW tersebut, membahas mengenai masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat yang merupakan rencana kebutuhan

pembangunan hasil musyawarah kelompok-kelompok masyarakat dimaksud, selanjutnya diajukan dan dijadikan sebagai salah satu bahan masukan (*input*) dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang desa / kelurahan).

Musrenbang Desa/kelurahan dilaksanakan oleh tim penyelenggara musrenbang desa/kelurahan yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya oleh kepala desa/lurah, dan pesertanya terdiri dari komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti; ketua RT/RW, kepala dusun/lingkungan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, organisasi masyarakat, komite sekolah, kelompok tani/nelayan, dan lain-lain. Wakil-wakil dari peserta tersebut yang memaparkan masalah utama yang dihadapi serta merumuskannya untuk dijadikan sebagai prioritas rencana kegiatan pembangunan di desa/kelurahan bersangkutan.

Dalam musrenbang tersebut, kepala desa/lurah serta ketua dan anggota BPD bertindak sebatas selaku narasumber yang menjelaskan tentang prioritas program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa/kelurahan.

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang desa/kelurahan adalah:

- 1) Dokumen rencana kerja pembangunan desa/kelurahan yang berisi;
 - a. Prioritas rencana kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh alokasi dana desa dan atau swadaya.

- b. Prioritas rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui dinas/instansi tingkat kabupaten atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk selanjutnya dibahas dalam forum musrenbang kecamatan.
- 2) Daftar nama delegasi desa yang telah dirumuskan oleh peserta musrenbang desa/kelurahan, untuk mengikuti MUSRENBANG Kecamatan.

b. Tingkat Kecamatan

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang menghasilkan daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan tersebut menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, untuk disampaikan dan dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat daerah (forum SKPD) dan musrenbang kabupaten/kota.

Mekanisme musrenbang, dilakukan dalam dua tahap yakni:

1) Tahap persiapan

Dengan penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan oleh camat. Tim Penyelenggara bertugas untuk mempersiapkan dan memfasilitasi segala sesuatunya untuk kelancaran penyelenggaraan musrenbang termasuk bahan materi pembahasan, judul, agenda, tempat serta penyampaian undangan peserta musyawarah.

2) Dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Peserta terdiri dari wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan untuk membahas, menyepakati serta menetapkan hasil-hasil musrenbang dari tingkat desa/kelurahan untuk menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan bersangkutan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Narasumber dalam musrenbang terdiri dari camat dan aparat kecamatan lainnya dari tingkat kecamatan, serta Bappeda, perwakilan SKPD Kabupaten/Kota dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan bersangkutan.

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

- a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi SKPD yang siap dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota, yang akan didanai oleh APBD Kabupaten/kota dan sumber pendanaan lainnya.
- b. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- c. Tingkat Kabupaten

Mekanisme perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten didahului dengan kegiatan pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD), kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbang Kabupaten) untuk menetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon / pagu dana baik berdasarkan fungsi SKPD

maupun yang dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya, serta rancangan pendanaan untuk alokasi dana desa.

Peserta forum SKPD Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan Renja SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD adalah menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).³⁴

E. Musyawarah dalam Pandangan Islam.

Ditinjau dari ranah agama bahwa islam adalah agama yang diturunkan Allah swt. Untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Pesan kebaikan benar-benar tersebar dalam islam baik Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagaimana dalam surah Ali-Imran ,tentang musyawarah terdapat dalam Q.S Ali-Imran/3 : 159 yaitu :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

³⁴ Martini M, Skripsi “Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Bantaeng (Survey di Kecamatan Bantaeng). h. 21-27

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”³⁵

Dari ayat di atas ada beberapa isi kandungan atau ajaran yang termuat dan tercantum di dalamnya yang dapat kita ambil, antara lain:

- a. Dalam menghadapi semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan.
- b. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan.
- c. Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan bertawakkal (menyerahkan diri dan segala urusan) kepada Allah.
- d. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakkal.³⁶



³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 56

³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 229-230.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.¹

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena bertujuan mendeskripsikan dan menguraikan partisipasi masyarakat pada MUSRENBANG di Kabupaten Bantaeng.

2. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan keilmuan dalam penelitian ini adalah Ilmu komunikasi khususnya komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan

¹ Lexy J. Moleong. *“Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1995, h.11

ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan yang disampaikan tadi dan Musrembang adalah salah satu bentuk aktivitas dalam pembangunan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan observasi dan wawancara kepada objek yang diteliti. Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang bukan sumber utama, yang bersifat data tambahan. Sumber data tambahan ini biasanya berasal dari dokumen tertulis melalui dari karya ilmiah populer dan semua buku atau catatan tertulis yang relevan dengan objek penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

D J. Supranto berpendapat bahwa data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya yang mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.² Data yang dibutuhkan dalam penulisan secara umum terdiri dari data yang bersumber dari

² J, Supranto, “Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran” (Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI, 1998, h.47).

penelitian lapangan. Observasi, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian dan dokumentasi secara berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan pada beberapa informan sebanyak 8 orang. Informan tersebut adalah 3 orang aparat pemerintah yakni anggota DPR, Camat Kecamatan Bantaeng, dan Lurah Kelurahan Mallilingi, 3 orang masyarakat, dan 2 orang SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yakni Bappeda dan PMD.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Data dokumentasi dalam penelitian terdiri atas foto-foto yang diabadikan pada saat melakukan penelitian dan penggunaan sumber lain berupa referensi dan data yang relevan dengan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan. Pengumpulan data penulis menggunakan beberapa data instrumen di lapangan sebagai alat untuk mendapat data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian diantaranya; wawancara, dokumentasi, dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera, alat perekam dan buku catatan.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam suatu penelitian, data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna dan menjadi data yang mati, maka dalam tahap analisis data ini memberi makna dan nilai yang terkandung dalam data. Jika kita memakai metode penelitian kualitatif, maka kita memakai analisis data dan non statistik. Analisis ini berdasarkan pada pola pikir ilmiah, mempunyai ciri sistematis dan logis.³

Langkah yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian dapat dipaparkan di bawah ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dengan cara disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang diperoleh dilapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah.⁴ Dalam penyajian data ini peneliti menguraikan setiap permasalahan dalam pembahasan penelitian dengan cara

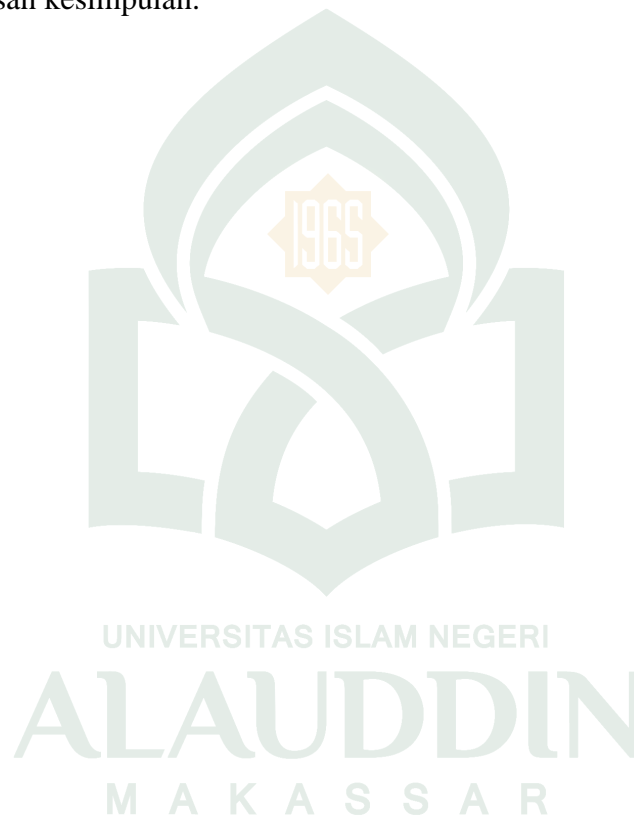
³Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010) h.129.

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dina Aksara, 2006) h. 54.

pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan-kesimpulan kemudian diverifikasi kembali dalam mempertimbangkan dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Profil Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng

a. Kondisi Geografis

Wilayah kelurahan Mallilingi berdasarkan kondisi topografinya berada pada ketinggian 2 meter dpl dengan tingkat kemiringan lerengnya antara 0 – 8 % dengan kategori sangat datar (0 – 2 %) hingga datar (3 – 8 %). Untuk kategori sangat datar wilayah penyebarannya tersebar di RW I, RW II, RW V, RW VI, RW VII dan RW VIII.¹

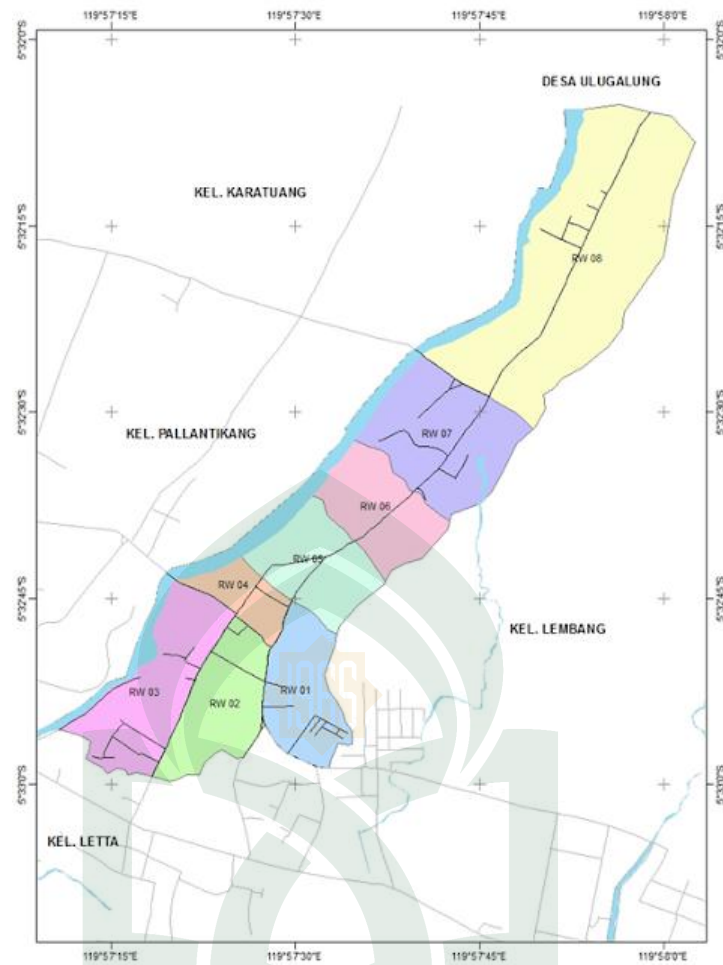
b. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Mallilingi dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Mallilingi pada tahun 2015 yaitu 1069 rumah tangga, 1.112 kepala keluarga terdiri dari 4940 jiwa yang terdiri dari 2290 jiwa laki-laki dan 2650 jiwa perempuan.²



¹BPS Kabupaten Bantaeng, *Statistik Daerah Kelurahan Malilingi* 2018, h. 1

²BPS Kabupaten Bantaeng, *Statistik Daerah Kelurahan Malilingi* 2018, h. 2



Gambar 4.1 Peta wilayah Kecamatan Bantaeng

B. Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan

tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bantaeng adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan Bantaeng untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang Kelurahan Mallilingi, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Di Kelurahan Mallilingi, Musrenbang terlaksana pada bulan Januari hingga bulan Februari. Adapun tingkat Kecamatan Bantaeng terlaksana pada bulan Maret dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan³.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah pihak kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan

³ Muhammad Anshar, (42), Staff Bappeda. Wawancara 27 November 2017. Bantaeng

Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan. Prinsip dalam Musrenbang berlaku baik untuk fasilitator, peserta, narasumber, dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang dan menjadi kesepakatan bersama sehingga Musrenbang benar-benar menjadi sebuah wadah/forum dalam mengambil keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Camat Kecamatan Bantaeng yang menjadi salah satu informan penelitian mengungkapkan bahwa beberapa persiapan yang dilakukan oleh pihak kecamatan adalah:

1. Camat menetapkan Tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
2. Rekrutmen Tim pemandu Musrenbang oleh Bappeda
3. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memilah dan mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab SKPD dari masing-masing Kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
 - b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
 - c. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
 - d. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari Kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
 - e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang Kecamatan.

f. Membuat Draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan.⁴

Senada yang disampaikan oleh informan lainnya, Yunita bahwa panitia penyelenggara yang disebut Tim Delegasi bertugas membuat undangan surat edaran dan menyebarkannya ke tiap kelurahan atau pun desa⁵.

Seluruh persiapan Musrenbang diupayakan semaksimal mungkin oleh penyelenggara termasuk menghadirkan elemen masyarakat yang diharapkan berpartisipasi memberikan masukan dan kritikan terhadap perencanaan program pembangunan. Pihak informan dari unsure PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) mengungkapkan bahwa untuk menggalang keterlibatan masyarakat pihak PMD mengirimkan surat ke seluruh kelurahan/desa, dan pihak kelurahan/desa menyebarkannya melalui pengumuman di setiap masjid kelurahan/desa dan menghimbau RT/RW agar melibatkan warganya dalam kegiatan Musrenbang. Selain itu Panitia penyelenggara juga membagi timnya. Ada yang bertugas dalam penataan kondisi ruangan, ada yang bertugas menyiapkan bahan atau lampiran-lampiran yang akan di musrenbangkan dan ada yang bertugas pendampingan yaitu mendampingi masyarakat untuk penyusunan program kegiatan.

Hal ini dikuatkan oleh Ridwan yang menjadi informan terkait upaya penyelenggara melibatkan warga bahwa :

Cara pemanggilan musrenbang itu melalui persuratan, SKPD menyurati ke tiap kelurahan/desa, dan kelurahan/desa menyampaikan informasi itu melalui

⁴ A. Chandra, (57) Camat Kec. Bantaeng, Wawancara, 25 November 2017, Bantaeng

⁵ Yunita Yustiani, (38) Staf PMD. Wawancara, 25 November 2017, Bantaeng

masjid Kriteria masyarakat yang dipanggil ialah masyarakat yang mempunyai keterampilan berbicara, merumuskan dan mewakili masyarakatnya untuk tampil di musrenbang.⁶

Beberapa elemen masyarakat juga hadir dalam kegiatan musrenbang seperti Anggota DPRD yang berasal dari Dapil yang bersangkutan, LSM yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan bersangkutan, Kelompok-kelompok sektoral tingkatan kecamatan seperti: Petani, Ojek, Nelayan, Buruh, kelompok perempuan, dan perwakilan pengusaha lokal yang didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumberdaya lokal. Terkait dengan partisipasi masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng terwujud dalam hal menghadiri, menyampaikan usulan mereka, dan melaksanakan kegiatan bersih-bersih. Respons masyarakat sekitar 70% tentang Musrenbang, karena mereka kecewa atas kegiatan tersebut karena sebagian usulan mereka tidak terlaksana terlebih lagi dalam penentuan kebijakan perumusan program kegiatan tidak semua masyarakat dilibatkan karena yang mewakili musrenbang itu hanyalah orang-orang yang dianggap mampu untuk melakukan komunikasi dalam perumusan kegiatan itu. Jadi melalui perwakilan masing-masing kelompok masyarakat masyarakat di tingkat kelurahan/desa⁷.

Namun berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak penyelenggara khususnya staf PMD :

Keterlibatan masyarakat sangat besar karena memang diharapkan berbeda dengan masa yang sebelumnya, bahwa kegiatan itu dirumuskan oleh SKPD

⁶ Ridwan, (38) Sekretaris Lurah, Wawancara, 25 November 2017, Bantaeng

⁷ A. Rahmat, (50) Tokoh Masyarakat (Ketua LPM), Wawancara, 25 November 2017, Bantaeng

dan dilanjutkan ke kelurahan/desa. Masyarakat cuma jadi penonton. Tetapi setelah sistem diganti dan keterlibatan masyarakat sangat besar karena rumusan, usulan perencanaan pembangunan itu memang dari masyarakat. Peran masyarakat ialah pelaksana, perumus, pengontrol dari pada kegiatan masing-masing di daerahnya.⁸

Ditambahkan oleh Yunita Yustiani bahwa bentuk lain keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang adalah keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, kesediaan dalam memberikan data dan informasi, keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan, keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rapat atau musyawarah, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada penyelenggara dan peserta lainnya. Pada saat ini mereka biasanya mengungkapkan kekecewaan mereka tentang beberapa aspirasi mereka yang tidak dijadikan sebagai program pilihan untuk direalisasikan. Pada kesempatan ini juga mereka berusaha meyakinkan bahwa program mereka sebagai masyarakat berbasis kebutuhan yang mendesak. Selain itu masyarakat juga mengungkapkan berbagai program-program yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pada realisasi Musrenbang berikutnya.

Dalam hal ini pemberian data dan informasi inilah masyarakat akan menyampaikan argumentasi tentang usulan program mereka. Misalnya program pengembangan UKM milik masyarakat. Data yang biasa mereka berikan adalah jumlah pengangguran di Kelurahan yang terus bertambah ditambah sehingga dapat

⁸ Yunita Yustiani, (38) Staf PMD, Wawancara, 25 November 2017, Bantaeng

meyakinkan bahwa pengembangan UKM merupakan hal yang harus segera mendapat perhatian.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng

1. Faktor Pendukung

Peranan komunikasi dalam pembangunan terkait dengan arah perubahan yang berarti kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan.. Untuk menyatukan adanya kepentingan kebijakan pemerintah dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka secara ideal dapat dilakukan perencanaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku

Dalam penelitian ini, faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng adalah tokoh masyarakat yang selalu mengingatkan dan menggugah kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Seperti yang disampaikan oleh Iwan informan yang mewakili masyarakat:

Pak Rahmat adalah tokoh masyarakat yang selalu mengajak kami untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Beliau sangat aktif meminta saran atau usulan tentang program-program yang dapat dilaksanakan bagi warga. Hanya saja respons masyarakat tidak terlalu menggembirakan karena pesimistis mereka terhadap musrenbang sebelumnya yang banyak mengabaikan usulan warga.⁹

Pernyataan Iwan tersebut di atas dibenarkan oleh informan yang berasal dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengungkapkan bahwa dukungan oleh Ketua RT/RW, beberapa tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang sangat membantu pihak pemerintah untuk turut serta melibatkan warga dalam berpartisipasi. Meskipun diakui oleh pihak penyelenggara bahwa tidak begitu banyak masyarakat yang terlibat seperti yang diharapkan. Padahal manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sangat besar seandainya mereka ikut serta dalam musyawarah ini.¹⁰

Mereka mendapat kebebasan menyuarakan usulan mereka terhadap program seperti apa yang dia butuhkan, masyarakat bebas menyampaikan apa-apa saja usulan yang mereka inginkan atau yang dia butuhkan dalam kegiatan musrenbang. Dalam usulan tersebut akan diterima dan dikumpulkan. Akan tetapi belum tentu terlaksana. Namun yang akan terlaksana usulan yang benar-benar yang diprioritaskan.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Yunita, salah seorang informan mengemukakan:

Kalau berbicara manfaat itu berarti akan ada perencanaan, apa yang direncanakan masyarakat sebelumnya artinya yang dikategorikan dari program skala prioritas otomatis ada perencanaan untuk ke depannya. Kalau program kegiatan yang masyarakat itu dimunculkan dan dilaksanakan di tahun berikutnya otomatis ada rasa pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diinginkan masyarakat itu akan tercapai. Namun selama ini tidak sesuai dengan yang diharapkan¹¹

⁹ Iwan, (25) Warga Wawancara, 10 Januari 2018, Bantaeng.

¹⁰ Yunita Yustiani, (38) Staff PMD Wawancara, 10 Januari 2018, Bantaeng.

¹¹ Muh. Iksan, (48), Anggota DPR, Wawancara, 13 Januari 2018, Bantaeng.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kehadiran tokoh masyarakat dalam mendukung kegiatan musrenbang dan mendorong partisipasi masyarakat sangat membantu pihak pemerintah untuk menggali kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat meskipun masih ada pihak sudah enggan melibatkan diri.

2. Faktor Penghambat

a. Berkurangnya Kesadaran Masyarakat

Musrenbang yaitu forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Namun kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan Musrenbang mengalami penurunan karena beberapa alasan diantaranya mereka terkendala dengan kesibukan yang tidak memungkinkan mereka berpartisipasi aktif pada saat Musrenbang diadakan.

Haidir salah seorang warga sekaligus informan penelitian mengungkapkan bahwa kesibukannya seringkali tidak sejalan dengan waktu pelaksanaan kegiatan musrenbang sehingga dirinya lebih mementingkan urusan pekerjaannya. Terlebih lagi menurutnya, urusan pembangunan biarlah pemerintah yang memikirkannya.¹²

b. Ketidakpuasan Masyarakat dalam Realisasi Program

Salah satu alasan ketidakpuasan masyarakat adalah pihak SKPD memunculkan atau melaksanakan kegiatan tanpa adanya rumusan dari bawah.

¹²Haidir, (27) Wawancara, 13 Januari 2018, Bantaeng.

Terkadang ada kegiatan masuk dan itu bukan dari keinginan masyarakat. Itulah yang kadang dikritik oleh masyarakat sebab program bukan bukan dari kebutuhan masyarakat tersebut. makanya terkesan sia-sia.¹³

Ditambahkan oleh Haidir, Karena program yang diusulkan seringkali diabaikan, maka kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat dinilai belum ada perubahan yang signifikan, khususnya pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur dasar seperti jalan raya yang terkait erat dengan aktivitas masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi dan pembangunan fisik/infrastruktur dasar tersebut, terutama di pedesaan, partisipasi masyarakat sangat penting, tidak sebatas pada tataran pelaksanaan di lapangan, tetapi mereka harus dilibatkan mulai dari awal perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.¹⁴

Dilanjutkan oleh Muh. Iksan musrenbang selama ini sudah berjalan, walaupun hasil dari Musrenbang tidak banyak diakomodir oleh pengambil kebijakan dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pemilik proyek. Akibatnya, ada banyak masalah di desa seperti persoalan air bersih, sarana dan prasarana jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak dibangun karena pengambil kebijakan hanya mampu menyerap sekitar 10 persen dari hasil Musrenbang. Masyarakat berharap usulan-usulan mereka terlaksana sekitar 50% dari usulan mereka terlaksana

¹³Haidir (27) Warga Wawancara, 10 Januari 2018, Bantaeng.

¹⁴ Haidir (27) Warga Wawancara, 10 Januari 2018, Bantaeng.

dalam tiap tahunnya. Usulan mereka dikumpulkan di tingkat kelurahan sekitar 20 usulan, namun dalam tingkatan kecamatan usulan mereka mengerucut hingga yang diterima sekitar 5 usulan. Dikarenakan anggaran yang terbatas. Bahkan dalam tingkatan kabupaten usulan mereka yang diterima sekitar 2 atau 3 dalam setiap tahunnya.¹⁵

Pernyataan Haidir sebagai wakil masyarakat yang merasa kecewa ditanggapi oleh Iwan:

Berbicara soal kendala memang tidak dapat dipungkiri, karena kondisi di daerah kita, diantaranya yang paling terasa di dalam komunikasi penentuan penetapan program kegiatan. Terkadang ada program kegiatan yang sifatnya skala prioritas bagi masyarakat. Cuma karena kondisi keuangan/anggaran yang sangat terbatas. Sejak tahun 2012 ada kebijakan dari Sekretaris Daerah (SEKDA) dalam hal pembagian program kegiatan ke masing-masing kelurahan/desa dalam kebijakan itu diharapkan harus ada program kerja yang muncul nanti sebagai skala prioritas di tingkat Kabupaten. Makanya dimaklumi tidak semua program terlaksana karena adanya keterbatasan anggaran.¹⁶

Masalah selanjutnya adalah berkembangnya usulan masyarakat yang sangat tidak signifikan dengan masalah masalah faktual yang terjadi di tengah tengah mereka, sehingga yang terjadi adalah kecenderungan untuk mendahulukan usulan program kegiatan yang diinginkan untuk selanjutnya dibuatkan masalah yang cocok atau sedikit berkaitan. Hal tersebut banyak ditemui di desa/kelurahan yang tidak melaksanakan secara efektif musrenbang tingkat dusun/lingkungan. Bahkan di desa musrenbang percontohan sekalipun ada kelompok masyarakat yang mengklaim bahwa musrenbang dusun tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat kemudian

¹⁵ Muh. Iksan, (48) anggota DPR, Wawancara, 13 januari 2018, Bantaeng

¹⁶ Haidir, (25) Warga, Wawancara, 13 januari 2018, Bantaeng

mengusulkan kegiatan baru untuk yang terindikasi akan diback up oleh kepentingan politik. Hal tersebut tentu akan melukai perasaan para pelaksana musrenbang tingkat dusun, sebab bagaimanapun kecilnya lembaga tersebut, harus ada penghormatan atas apa yang dilakukan.¹⁷

Namun SKPD itu melayani masyarakat dan kedua sudah menjadi perintah dari kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal melayani masyarakat harus legowo menerimanya dan apa yang disampaikan oleh masyarakat itu merupakan saran-saran yang baik apa lagi menyangkut kebutuhan dari pada di daerahnya. Jadi setiap masyarakat yang mengajukan kritik dan saran kepada pemerintah dalam hal ini melalui SKPD teknisnya itu sangat didengarkan, di agendakan, dan menjadi pertimbangan untuk kedepannya. Jika ada program yang tidak bisa kita masukkan ke APBD, pihak SKPD akan mencari sumber-sumber anggaran lainnya seperti DAK atau Akomodasi Khusus, APBN, dan APBD 1 Provinsi.¹⁸

Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus

¹⁷ Muh. Iksan, (48) Anggota DPR, Wawancara, 13 Januari 2018, Bantaeng.

¹⁸ Yunita Yustiani, (38) Staf PMD. Wawancara, 10 Januari 2018, Bantaeng.

dibangun dengan berorientasi padaperlibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

D. Pembahasan

Peran komunikasi dirasakan sangat penting terutama dalam pembangunan. Penggunaan komunikasi pun disesuaikan dengan fungsi serta tujuan yang diinginkan. Tujuan komunikasi mencakup menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan hidup serta menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat begitu juga sebaliknya, maka pembangunan yang direncanakan bersama antara pemerintah dengan masyarakat akan memberikan manfaat positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komunikasi dan pembangunan ini merupakan dua hal yang saling berhubungan. Komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian

terhadap pembangunan. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang telah disampaikan.

Dalam praktiknya, pemerintah belum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memutuskan apa yang diinginkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat masih merupakan wacana pemerintah semata. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan pergeseran paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai sentral dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek yang dibangun tetapi sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan pembangunan sehingga pada tahapan selanjutnya diharapkan akan tetap ada partisipasi masyarakat. Salah satu media yang menjadi wadah bagi masyarakat dalam berpartisipasi adalah ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbang seperti yang terjadi pada Musrenbang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Namun ada beberapa hal yang jadi keluhan masyarakat tentang pola Musrenbang, seperti desa/kelurahan tidak memiliki kuasa untuk menentukan program mana yang ingin dikerjakan nantinya, dan banyaknya usulan sekadar memenuhi list program yang diajukan, tanpa ada jaminan berapa jumlah program yang terakomodasi.

Hasil penelitian menunjukkan, dari semua usulan masyarakat setiap tahunnya, program yang terserap dalam perencanaan dan penganggaran hanya sepersekian persen. Padahal, masyarakat yang awalnya antusias ikut dalam proses musrenbang menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan. Kekecewaan ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kehadiran dalam proses tahun berikutnya. Lebih parah lagi keaktifan masyarakat pada kegiatan pembangunannya lainnya semakin menurun. Tidak terjangungnya program-program yang diajukan juga terjadi karena beberapa faktor, seperti kesalahan postur anggaran, tren dan prioritas pembangunan daerah tidak sesuai dengan program, dan beberapa faktor lainnya.

Proses pelaksanaan Musrenbang merupakan proses partisipatif dimana berbagai keputusan diambil dalam suasana dialogis, akan tetapi Musrenbang seringkali tak menghasilkan keputusan apa-apa sehingga masyarakat kecewa dan enggan mengikuti proses Musrenbang lagi. Proses pengambilan keputusan di dalam Musrenbang seringkali dilakukan secara cepat karena waktu yang amat singkat dan terlalu banyak sesi seremonial sehingga proses musyawarah yang dilakukan terlalu singkat.

Identifikasi potensi dan masalah Desa/kelurahan serta analisis kesesuaian usulan dengan Potensi Wilayah Desa berasal dari masing masing dusun atau lingkungan yang ada di wilayah tiap tiap kelurahan atau desa. Peran kepala dusun atau kepala lingkungan menjadi begitu vital karena melalui mereka, pelaksanaan kegiatan musrenbang dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Akan tetapi seringkali, sebagian besar diantara mereka menjadi tidak peduli akibat berbagai

keterbatasan, hambatan serta tantangan paradigma musrenbang yang seringkali menjemukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng terwujud dalam hal menghadiri, menyampaikan usulan mereka, dan melaksanakan kegiatan bersih-bersih
2. Faktor Pendukung dalam Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yaitu tokoh masyarakat yang selalu mengingatkan dan menggugah kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Adapun factor penghambatnya adalah berkurangnya kesadaran mereka karena kesibukan pribadi yang tidak ingin ditinggalkan dan anggapan bahwa pembangunan adalah urusan pemerintah serta ketidakpuasan masyarakat dalam Realisasi Program.

B. Implikasi Penelitian

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi keberhasilan proyek-proyek pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan program-program pembangunan dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan pembangunan sehingga pada tahapan selanjutnya diharapkan akan tetap ada partisipasi masyarakat. Diharapkan bahwa dengan pelaksanaan Musrenbang selanjutnya akan tercipta Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi khususnya dalam mengemukakan usulan dan berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan Musrenbang secara hakiki dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- A Devito, J, *Komunikasi Antar Manusia*, (Jakarta : Profesional Books, 2002).
- A. Widjaja, W, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta: Bumi Askara).
- A.Gorden, Willian, *Communitas Personal and Public* (Sherman Oaks, CA. Alfred 1978).
- Amien, A.Mappadjantji, *Kemandirian Lokal, Perspektif Sains Baru Terhadap Organisasi, Pembangunan dan Pendidikan*, Jakarta: 2003.
- Bungin Burhan, *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Cangara Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011)
- Djuarsa Sendjaja, Sasa, *Pengantar Komunikasi*, (Cet ke-4; Jakarta: Universitas Terbuka 1993)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.
- Elvinaro Ardianto, Harun, H. Rochajat , *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial Perspektif Dominan, Kaji ulang, dan Teori Kritis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- J, Supranto, "Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran" (Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI, 1998.
- Kasiran Moh., *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* , Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- M. Hardjana, Agus, "Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal", (Yogyakarta, Kanisius, 2003)
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Nasution, Zulkarimen, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Ruslan Rosady, *“Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi”* Edisi 1, Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sahroni, dkk, *“Perencanaan Pembangunan Daerah”*, Jakarta: GTZ-Usaid, 2000.

Solechkan , Moch.. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara Press, Malang. 2017

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Dina Aksara, 2006.

Uchjana Effedi, Onong, *Ilmu Komunikasi; Teori dan Pratek* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1997)

Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sumber lain :

Bekti, *“Musrenbang: Musyawarah Perencanaan Pembangunan”*, ([Journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp8e487ca97cfull.html](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp8e487ca97cfull.html))

Deddy M, *“Komunikasi Pembangunan Partisipatif”* (<http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/64650/1/I13rru.pdf> /13/08/2017)

Faisal Wibowo, *“Komunikasi Verbal dan Nonverbal”*, <http://faisal-wibowo.blogspot.co.id/2013/01/komunikasi-verbal-dan-nonverbal.html> (24 September 2017)

Hadiyanto, *“Komunikasi Pembangunan Partisipatif: Sebuah Pengenalan Awal”*, Departement Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2008. (http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnal_kmp/article/viewfile/5670/4301)

<http://pengertianmenurutahli.blogspot.co.id/2013/10/pesan-dalam-proses-komunikasi.html> diakses pada tanggal 28 januari 2017

Martini M, *Skripsi “Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Bantaeng (Survey di Kecamatan Bantaeng), 2010.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andi M. Dirga Firgiawan, lahir di Ujung Pandang, tanggal 11 Juni 1995 merupakan anak pertama dari empat (4) bersaudara pasangan Bapak Andi Nur Alam Samad dengan Ibu A. Martini M.

Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari SD Negeri No.05 Lembang Cina Bantaeng pada tahun 2001, kemudian melanjutkannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 02 Bissappu Kabupaten Bantaeng pada tahun 2007, lalu kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Bantaeng tahun 2010. Tahun 2013 melanjutkan pada jenjang Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi.